

Juli 2002-08-076

PEMILU 2009 dalam Perspektif Demokrasi

R. Siti Zuhro

A. Negara, Civil Society dan Demokrasi

Demokrasi dan *civil society* seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya eksis secara bersama, dan tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Suatu negara disebut demokratis bila ada suatu kekuatan aktif dari *civil society* yang membatasi dan memperkuat kekuasaan negara. Dalam masyarakat demokratis, negara harus mendapat persetujuan *civil*

society dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Sebaliknya, *civil society* juga memerlukan negara yang efektif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, di negara yang demokratis, kualitas negara tergantung pada kualitas dari *civil society*-nya, demikian juga sebaliknya.

Civil society didefinisikan sebagai sektor non-negara suatu masyarakat. Sejarah konsep *civil society* bisa ditelusuri kem-



bali dalam perdebatan klasik antar ahli filsafat seperti Thomas Hobbes, John Lock, Montesquieu. Kemudian dalam diskursus modern yang dilakukan oleh Hegel dan Marx, dan saat ini oleh para pengikutnya.

Teori Hegel mengenai negara dan *civil society* dibagi dalam dua bagian penting: pertama, pandangannya yang memberi posisi unggul terhadap negara. Bagi Hegel, *civil society* adalah *realm* dari individu, yang memiliki kepentingan, hak pribadi dan egoismenya. Sebagai kontras, negara membawa misi rakyat, melindungi kepentingan umum dan melayani kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, *civil society* harus tunduk pada negara, karena negara melaksanakan kebaikan bagi seluruh rakyat. Sementara *civil society* hanya berhubungan dengan beberapa kepentingan pribadi dari anggotanya. *Civil society* akan membawa negara ke banyak arah yang berbeda.

Kedua, Hegel dapat dilihat sebagai ahli filsafat yang mempromosikan demokrasi. Menurutnya bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah tentang pembebasan manusia. Dalam sistem lama, hanya "seorang" yang memimpin (monarki), tapi dalam

perkembangannya melibatkan beberapa orang terpilih memimpin (oligarki), dan untuk saat ini dan masa yang akan datang setiap orang akan memimpin (demokrasi). Oleh karena itu, demokrasi lebih maju, demikian juga *human society*, kenyataannya kita bergerak ke arah ini. Setelah Hegel, Fukuyama yang terkenal dengan bukunya "The End of History", intinya mengemukakan bahwa pada akhirnya setiap negara akan menjadi demokratis, setelah melihat jatuhnya sistem otoriter di beberapa negara sosialis di Eropa Timur (Fukuyama, 1989).

Karl Marx, yang adalah murid Hegel, menantang teori Hegel mengenai *civil society*. Bagi Marx, hal yang paling penting bukannya pembagian negara dan *civil society*, tapi pembagian antara pemilik modal dan kelas pekerja. Dalam masyarakat kapitalis, negara dan *civil society* secara keseluruhan melayani kepentingan sistem kapitalis, yang memberi keuntungan kepada pemilik modal (kelas dominan) dan birokrat dari negara kapitalis. Demokrasi dalam masyarakat kapitalis adalah proyek dari kapitalisme yang memberi *image* kesetaraan hak dan kesempatan bagi rakyat. Tapi kenyataannya sistem ini dimanipulasi oleh

kelas dominan untuk kepentingannya sendiri. Negara juga berada di bawah kendali kelas dominan ini, karena keberadaan dan operasionalisasi negara didanai oleh pemilik modal melalui sistem pajak. Demikian juga demokrasi yang dihasilkan dari sistem ini pada dasarnya bersifat "*bourgeois democracy*", melayani kepentingan *bourgeoisie* (bojuis) atau kelas kapitalis. Dengan kata lain, dalam masyarakat tersebut, apa yang baik bagi kaum borjuis akan bagus pula bagi negara.

Oleh karena itu, demokrasi bukanlah bentuk ideal bagi "*end of history*", karena eksploitasi masih ada dalam masyarakat demokratis. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak berkelas atau masyarakat sosialis, yang dapat dicapai melalui cara damai atau kekerasan seperti revolusi.¹ Perdebatan

tentang negara dan *civil society* diteruskan, terutama mengikuti ide Hegel. Yang fokus pada tujuan mendemokratisasikan masyarakat supaya mereka mendapatkan keadilan, daripada mengubah masyarakat yang ada ke dalam negara sosialis. Diskusi-diskusi belakangan ini sebagian besar mengonsentrasikan bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas *civil society* untuk menghasilkan demokrasi yang baik, sehat dan abadi yang melayani semua rakyat.

Makalah ini membahas peran *civil society* di Indonesia dalam memengaruhi penciptaan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis merujuk pada suatu sistem politik dalam mana pemerintah bertanggung jawab dan melayani kepentingan mayoritas rakyatnya. Ada dua hal penting dalam konsep pemerintahan demokratis: pertama, proses politik demokratis, yang melibatkan rakyat dalam pembuatan kebijakan; kedua, hasilnya baik, dalam arti melayani kepentingan dan membawa keadilan bagi mayoritas rakyat. Sebagaimana argumen Marx yang mengkritisi demokrasi kapitalisme, kita harus mempertimbangkan bahwa pemerintahan demokratis tidak selalu menghasilkan suatu yang bagus.

¹ Marx dan pengikut Marx klasik percaya bahwa masyarakat sosialis hanya dapat dicapai melalui revolusi. Karena kelas kapitalis dominan tidak akan menyerahkan posisinya secara sukarela dalam cara damai. Neo-Marxis, yang juga disebut sebagai *Euro-Coomunist movement* pada tahun 1970an percaya bahwa dalam dunia modern, sosialisme harus dicapai melalui cara demokratis.

B. Pemerintahan Demokrasi di Indonesia

Pergantian pemerintahan mulai dari Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan nuansa sendiri bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan *civil society*. Berbeda dengan pemerintahan Soeharto, sejak pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY, kesemua pemerintahan ini dapat dikatakan relatif demokratis. Terutama bila ini dikaitkan dengan peran penting *civil society* dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Perlu juga dicatat bahwa ada banyak aktor dalam *civil society*. Peran penting mereka berubah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Pada umumnya, aktor utama dalam *civil society* adalah partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat (lembaga mahasiswa, perserikatan buruh, organisasi perempuan dll.) yang memainkan peran penting di belakangnya. Namun, di bawah kepemimpinan Soeharto, misalnya, partai politik dikendalikan oleh pemerintah, dan bahkan dilumpuhkan. Partai hanya eksis sebagai dekorasi dalam demokrasi Pancasila-nya Soe-

harto. Oleh karena itu, organisasi non-pemerintah dan intelektual, meskipun dengan kekuatan terbatas, mereka berupaya mempertahankan kepentingan rakyat (Uhlin, 1997:97-105 dan 111-116).

Pertanyaan, siapakah aktor penting dalam pemerintahan demokrasi setelah Soeharto? Bagaimana mereka melakukan perannya tersebut, khususnya dalam kontribusinya untuk menciptakan suatu pemerintahan demokrasi.

1. Pemerintahan Soeharto (1966-1998): Pemerintahan kuat, *civil society* lemah

Indonesia baru kembali ke sistem demokrasi (setidak-tidak proses menuju ke sana) bulan Mei 1998, yaitu ketika Soeharto dipaksa mundur. Sejak saat itu rakyat bisa mengemukakan pendapatnya dengan bebas, sensor terhadap media ditiadakan dan munculnya sistem multi partai.

Kepemimpinan Soeharto yang dimulai sejak 1966, pelan tapi pasti mulai mengarah ke sistem otoritarian. Kebijakannya hanya membolehkan dua partai (PDI dan PPP) dan Gol-

kar adalah salah satu contoh yang jelas. Media dikontrol dan masyarakat harus menjaga stabilitas politik untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi dengan tidak menyatakan opininya secara terbuka. Dengan kata lain, *civil society* dikondisikan untuk diam. Dengan sistem politik seperti ini, rakyat tidak memiliki teman. Golkar merupakan partai pemerintah yang didukung oleh militer. Juga diatur bahwa semua pegawai negeri sipil (PNS) diminta untuk bergabung dengan Golkar, atau mereka kehilangan pekerjaannya. Sementara PDI dan PPP berada dalam kendali ketat pemerintah. Bahkan pemilihan pemimpin partai pun harus mendapat persetujuan pemerintah. Lebih dari itu, calon anggota parlemen juga harus lulus litsus yang dilakukan pihak intelijen militer. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila PPP dan PDI juga sangat tergantung pada pemerintah, sementara partai tidak bisa mengkritisi pemerintah demi kelangsungan partainya.

Jadi hanya ada dua kelompok masyarakat yang cukup berani mengkritisi pemerintah. Mereka ini kemudian menjadi "teman rakyat". Mereka ini adalah kelompok intelektual dan ornop. Intelektual yang biasanya

tinggal di kota besar ini menyatakan kritiknya melalui media massa secara terbuka. Kekuatan kritik mereka ini ada pada kekuatan moralnya, dan bukan politik. Meskipun mereka mampu menciptakan opini publik, mereka ini tidak memiliki basis massa pendukung, sehingga pengaruhnya sangat terbatas. Karena itu pula, pemerintah memberikan toleransi kepada kelompok intelektual (Uhlen, 1997:88-92 dan 94-97).

Bagi pemerintah, mengontrol pers lebih diminati daripada mengendalikan intelektual secara langsung. Sebagai hasilnya intelektual secara moral posisinya cukup kuat, tapi secara politik sangat lemah. Hal ini menguntungkan pemerintah, karena kritik-kritik mereka tidak membahayakan kekuasaan pemerintah. Pemerintah juga diuntungkan dengan posisi intelektual demikian karena berarti ikut menjustifikasi bahwa Indonesia adalah negara demokratis.

Demikian juga dengan ornop, organisasi ini tidak memiliki basis massa. Ornop biasanya hanya memiliki sekitar 10 anggota yang bekerja untuk program tertentu. Sebagai contoh, ornop yang bekerja di bidang penghapusan kemiskinan, bantuan

hukum untuk rakyat miskin, masalah lingkungan, hak-hak asasi manusia dll. Tak sedikit ornop yang memiliki jaringan dengan luar negeri. Mereka juga mendapat bantuan dana dari luar negeri dan ornop asing. Terhadap ornop ini, pemerintah cenderung bersikap hati-hati, mengingat hubungan ornop domestik dengan ornop asing cukup erat. Bila tidak hati-hati, jaringan ornop internasional akan bereaksi melawan pemerintah, bila ornop dalam negeri ditekan pemerintah. Jaringan ornop internasional ini lebih kuat ketimbang jaringan yang sama untuk kelompok intelektual. Kasus Kedung Ombo merupakan salah satu contoh penting, di mana pemerintah akhirnya mengakhiri cara represifnya waktu itu. Tekanan yang dilakukan institusi internasional menjadikan pemerintah lebih responsif. Sebagai akibat dari meningkatnya peran mereka ini, seluruh ornop harus melapor ke pemerintah, termasuk dari mana dana yang mereka peroleh. Meskipun demikian peraturan ini tidak efektif, karena pemerintah tidak memiliki *bargaining power* ketika berhadapan dengan ornop internasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di bawah pemerintahan

otoritarian Soeharto, ornop dan intelektual yang dapat mengontrol/*monitoring* penyalahgunaan pemerintahan, meskipun dalam skala terbatas. Namun, karena kekuatan mereka ini utamanya kekuatan moral dan bukan politik, mereka gagal mendorong proses demokratisasi. Organisasi yang memiliki basis massa seperti partai politik, serikat buruh, dan organisasi tani dll. juga tidak bisa berbuat banyak karena mereka secara politik sangat ditekan oleh pemerintah represif Soeharto. Dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak memberi kesempatan *civil society* untuk independen dan bebas dari intervensinya.

Adalah jelas bahwa kelompok intelektual dan ornop tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk menahan lajunya sistem otoritarian. Namun demikian mereka berhasil dalam hal menciptakan opini publik yang kuat, meski senantiasa ditekan. Tekanan pemerintah itu seolah tak lagi memiliki dayanya ketika gerakan reformasi muncul tahun 1998. Kekuatan demokrasi menembus dengan kuatnya bangunan otoritarian, sehingga menghasilkan keterbukaan politik yang tak satu elemen kekuatan di negeri ini bisa menahannya.

2. Pemerintahan Habibie (1998-1999): Pemerintahan transisi dengan presiden lemah

Bersamaan dengan mundurnya Soeharto, *civil society* mulai muncul. Habibie yang menjabat sebagai Wakil Presiden, akhirnya menggantikan Soeharto dan menjadi Presiden yang ketiga Republik Indonesia. Loyalitas Habibie ke Soeharto membuat rakyat menganggapnya sebagai presiden transisi yang berkewajiban melaksanakan pemilihan umum.

Dengan kurangnya legitimasi politik yang ia peroleh, maka Habibie menjadi presiden dengan posisi yang lemah. Namun, tak sedikit pakar politik yang mengakui bahwa pemerintahannya adalah demokratis.

Sebagaimana disebutkan, era Habibie menghasilkan pemerintahan yang relatif demokratis, yang menyertakan secara substansial partisipasi *civil society* dalam proses pembuatan kebijakan publik. Meskipun demikian tuntutan untuk menciptakan *good governance* belum terlaksana secara memadai. Korupsi masih marak, pejabat yang melakukan korupsi di era pemerintahan sebelumnya masih besar, pe-

negakan hukum masih sulit diwujudkan. Salah satu hasil karya penting selama kepemimpinan Habibie adalah kebebasan pers dan pelaksanaan pemilu yang demokratis tahun 1999.

Dengan demikian jelaslah bahwa aktor *civil society* di era ini utamanya adalah mahasiswa dan intelektual yang menyampaikan opininya melalui kebebasan pers dan partai politik. Namun, karena parlemen tidak memiliki kekuasaan riil (masih merupakan parlemen sistem lama yang kehilangan legitimasinya), bangkitnya kekuatan partai politik tidak memiliki kendaraan politik untuk menekan pemerintah. Karena tidak memiliki legitimasi, Habibie tidak berani melawan tekanan *civil society*, setidaknya secara terbuka.

3. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001): Parlemen kuat dengan presiden yang erratic

Wahid merupakan presiden keempat yang dipilih secara demokratis. Dia tergolong presiden yang kuat. Pertama, memiliki kepribadian yang kuat dan visi politik yang jelas, namun sikapnya *erratic*. Kedua, karena dipi-

lih melalui pemilu, maka Wahid memiliki legitimasi yang besar. Tidak hanya presidennya saja yang memiliki legitimasi rakyat, parlemennya pun demikian juga. Sebagai hasilnya di era ini telah muncul dua institusi politik yang kuat: presiden dan parlemen.

Dalam suatu negara demokrasi, kualitas negara/pemerintahan tergantung pada kualitas *civil society*. Hal ini karena dalam prakteknya pemerintah harus bekerja berdasarkan kepentingan kelompok sosial-politik yang dominan. Setelah pemilu 1999, aktor paling kuat yang mewakili *civil society* adalah parlemen yang dikontrol oleh partai politik. Sifat alergi intelektual dan pimpinan ornop terhadap partai politik terbawa sampai era reformasi, periode setelah tumbangannya Soeharto. Sayangnya sebagian besar orang-orang yang masuk di partai adalah orang-orang yang mencari keuntungan semata. Kenyataannya, partai dengan orang-orangnya seperti itu yang mengontrol parlemen.

Pasca pemilu 1999 pusat kekuasaan berpindah ke parlemen. Dengan perolehan suara 34%, PDI-P-nya Megawati merupakan partai pemenang pemilu. Kelambanan partai ini dalam

membaca kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lainnya, akhirnya menunda kesempatan Mega untuk menjadi presiden. Dan Abdurrahman Wahid akhirnya muncul sebagai presiden melalui kompromi politik yang dilakukan partai dalam parlemen. Wahid berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi Indonesia, kekuasaan militer harus dikurangi. Untuk itu ia akhirnya memecat Jenderal Wiranto dari kabinetnya. Dan menempatkan personil militer yang dinilai progresif untuk membantu pemerintahannya. Masalah yang dihadapi Wahid tidak hanya militer tapi parlemen yang makin kuat posisinya berhadapan dengan eksekutif. Setelah satu tahun pemerintahannya, semakin tampak bahwa konfliknya dengan parlemen semakin besar. Bahkan menjelang kemundurannya, ketidaksukaan pimpinan partai terhadap Wahid makin tampak, terutama partai Islam yang ikut menaikannya ke presiden.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa selama periode kepemimpinan Wahid, demokrasi relatif eksis. Hal ini salah satunya ditunjukkan melalui peran partai politik yang lebih kuat daripada pemerintah. Bahkan perannya sangat menonjol, di mana

DPR mampu memundurkan Wahid dari kursi kepresidenan. Oleh sebab itu, peran *civil society* sangat substansial ketika berhadapan dengan pemerintah.

Pertanyaannya, apakah ini baik untuk masyarakat? Dari gambaran di atas justru menunjukkan arah sebaliknya, yaitu negatif. Pemerintah dan parlemen gagal bekerja bersama secara produktif. Hal ini sebagian karena sikap presiden Wahid yang *erratic*, tidak memiliki *skill* dalam mengelola politik dalam konteks negara, juga karena sebagian besar anggota dewan melindungi kepentingan individunya, sehingga mereka gagal mendukung beberapa kebijakan pemerintah, seperti melawan korupsi. Selama periode itu hampir tak ada yang dilakukan.

4. Megawati: Presiden perempuan pertama (2001-2004)

Apakah pemerintahan Megawati adalah demokratis dan merealisasikan *good governance*? Seperti pendahulunya, Mega cenderung kurang sensitif terhadap tuntutan *civil society*. Mega juga cenderung memelihara *status quo*.

Kontrol dari partai politik lemah karena PDI-P merupakan partai yang memenangkan pemilu 1999. Meskipun tidak penuh, pemerintahan Megawati setidak-tidaknya dapat mengendalikan partai politik dan parlemen. Dalam kaitan ini, bisa dikatakan PDI-P, Golkar dan militer membentuk oligarki politik.

Dalam situasi politik seperti ini, ornop dan intelektual adalah pemain pinggiran. Beberapa intelektual dan mahasiswa menyampaikan kritiknya melalui media agar pemerintah bertindak tegas melawan korupsi, dan menyertakan rakyat untuk melakukan itu. Beberapa ornop seperti ICW, IGW dan YLBHI juga melakukan hal yang sama. Bersama-masa dengan media, mereka memberikan data dan mendorong agar korupsi diberantas. Kelompok ini sangat aktif dalam mendorong perubahan, tapi tanpa hasil. Sejak 1999, aktor-aktor *civil society* hanya bermain dalam garis margin karena mereka tidak memiliki *official position*. Mereka hanya bergerak sebagai kekuatan moral.

Berbeda dengan Soeharto, Megawati tidak pernah menahan atau menghambat *civil society* untuk bersuara. Namun, kritik-kritik yang dilakukan

civil society tidak menghasilkan sesuatu yang konkret. Dan pemerintah cenderung tidak memperhatikan semua kritikan itu. Akibatnya, kekecewaan masyarakat meningkat, reputasi pemerintah menurun dan sebagai hasilnya perolehan suara PDI-P di pemilu 2004 menurun.

Adalah jelas bahwa pemerintahan Megawati bukanlah otoritarian, tapi bukan pula demokratis, ini bila demokrasi kita maknai sebagai respons terhadap kritik yang dilayangkan *civil society*. Hal ini tidak memberikan hasil yang baik, tapi penampilannya tidaklah jelek juga, terutama dalam melengkapi kebutuhan rakyat dengan ketertiban sosial. Ekonomi tidak meningkat cepat, tapi juga tidak menurun. Semuanya tampak mengambang, tidak naik, tapi tidak pula turun.

5. Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang): Legitimasi tinggi dengan peran parlemen yang kuat

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan satu-satunya presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Bisa dikatakan bahwa pemerintahan-

nya memiliki legitimasi yang relatif tinggi, meskipun hanya didukung oleh partai kecil (Partai Demokrat). Ironisnya, dengan legitimasi yang dimiliki tersebut belum mampu merealisasikan terobosan-terobosan signifikan di berbagai bidang, khususnya dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran. Bahkan pemerintahan SBY dinilai cenderung kurang responsif terhadap tuntutan *civil society*. Tapi sebaliknya, cenderung sensitif terhadap kritikan-kritikan dari masyarakat terhadap kebijakannya.

Sebagai akibatnya *good governance* yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sulit terwujud. Semangat untuk mereformasi birokrasi, misalnya, terhambat oleh beberapa rancangan undang-undang (seperti RUU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Pemerintahan dll.) yang sampai saat ini belum disahkan DPR. Di satu sisi pemerintahan SBY relatif konsisten dengan upaya pemberantasan korupsi; tapi di sisi lain korupsi berkembang makin marak mulai level nasional sampai lokal.

Lepas dari itu, kontrol partai politik dan parlemen cenderung menguat yang menyebabkan beberapa kebijak-

an pemerintah sulit direalisasikan. Munculnya mekanisme *checks and balances* ini masih dimaknai secara distortif oleh parlemen karena kepentingan partai dan fraksi tampak lebih menonjol ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat. Pemerintahan SBY relatif sulit mengendalikan partai politik dan parlemen, apalagi SBY berasal dari partai kecil. Parlemen dikuasai oleh partai-partai besar yang membentuk oligarki politik.

Dengan fenomena seperti itu, ornop dan intelektual meskipun berperan penting dalam mendorong demokratisasi, dalam realitanya mereka terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tekanan-tekanan yang diberikan elemen-elemen dalam *civil society* kepada pemerintah agar bersikap tegas kepada koruptor kelas kakap (seperti kasus BLBI), penyelesaian masalah lumpur Lapindo, pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran belum mendapatkan respons maksimal. Jerit-tangis rakyat kecil dan tuntutan para aktivis dan intelektual belum mampu menggoyahkan kebijakan pemerintah dan DPR supaya kebijakannya lebih memihak ke rakyat kecil. Berbagi ornop seperti ICW,

Parliamentary Watch dan kelompok-kelompok terpinggirkan (buruh, petani, nelayan dll.) juga melakukan hal yang sama, menuntut pemerintah agar membenahi perekonomian dan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Dukungan yang sama juga diberikan oleh pers dengan memuat skandal korupsi dan penyelewengan jabatan yang dilakukan para elit politik dan birokrat. Elemen-elemen kekuatan dalam *civil society* bahu-membahu mendorong perbaikan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Namun, upaya mereka ini belum wujud. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa selama era reformasi aktor-aktor *civil society* cenderung bermain dalam garis margin. Mereka tidak memiliki *official position* dan hanya bergerak sebagai kekuatan moral.

Di era reformasi sekarang ini, pemerintah relatif memberikan peluang yang cukup kepada *civil society*. Meskipun upaya-upaya mereka belum memberikan dampak yang konkret terhadap perbaikan kebijakan publik, mereka ini senantiasa vokal dan tak lelah mengkritisi kebijakan pemerin-

Di bawah pemerintahan SBY, peta kekuatan politik Indonesia agak berubah: tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif saja yang memainkan peran penting, rakyat secara umum juga berperan relatif signifikan. Ini merupakan konsekuensi logis sistem pemilihan langsung yang telah menggeser demokrasi perwakilan menjadi demokrasi partisipatoris. Rakyat relatif menjadi kekuatan baru yang ikut menentukan kancah politik di Indonesia. Masalahnya adalah kehidupan yang semakin sulit, jumlah kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah membuat rakyat makin apatis, kecewa dan resah. Kondisi seperti ini secara politik akan sangat berpengaruh terhadap reputasi pemerintah. Apalagi pemilu sudah semakin dekat. Partai Demokrat adalah partai kecil yang perlu dukungan partai besar seperti Partai Golkar. Bisa diprediksikan bahwa posisi Presiden akan mudah goyah bila tak didukung partai besar di Parlemen.

Di pemilu 2009 yang akan datang tampaknya dua partai besar: Partai Golkar dan PDI-P akan memiliki peluang untuk tetap berjaya. Dalam hal pemilihan presiden/wakil presiden, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa hanya kesengsaraan dan

kekecewaan rakyatlah yang mampu menggulingkan dan menggagalkan pemimpin yang sedang berkuasa dan atau calon pemimpin yang hendak ikut pemilu.

Meskipun pemerintahan SBY tidak otoritarian, tapi ia belum maksimal dalam merealisasikan demokrasi. Insituisionalisasi lembaga demokrasi belum mewujudkan secara konkret. Ini bila demokrasi dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan publik. Di tantaran praksis kebijakan publik cenderung tidak memihak suara *civil society* dan cenderung merugikan mereka. Ini membuat penampilan pemerintah tidak maksimal: di dalam negeri citranya cenderung kurang memuaskan, tapi di luar negeri relatif baik. Sementara itu, kondisi ekonomi Indonesia masih memprihatinkan, meskipun keadaannya tidak di titik paling bawah. Demikian juga dengan realisasi penegakan hukum yang masih lemah. Semuanya tampak tidak pasti (*unsertain*). Di bidang politik, UU Pemilu yang disahkan DPR RI tanggal 3 Maret 2008 menyisakan pekerjaan rumah yang tak ringan. UU ini telah memunculkan kontroversi dalam masyarakat. Gugatan *judicial review* yang dilayangkan

DPD RI atas UU 10/2008 tentang Pemilu merupakan petunjuk jelas bahwa UU ini menyalahi nilai-nilai demokrasi dan bisa jadi juga menyalahi Konstitusi.

Setelah melalui proses transisi ke demokrasi yang penuh lika-liku, tampaknya inilah hasil maksimal yang bisa didapat sejauh ini, dan mungkin ini pula yang bisa dicapai oleh Indonesia untuk sementara ini.

Prospek ke Depan

Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara. Hal ini dimungkinkan bila pemilu 2009 berhasil memilih presiden yang *inline* dengan agenda reformasi. Bahwa pemilu 2009 yang akan dilaksanakan secara langsung tahun depan merupakan kesinambungan perubahan fundamental politik Indonesia sejak 2004. Dan ini semestinya merupakan tonggak bagi kebangkitan politisi sipil yang hendak mempromosikan demokrasi dan penguatan *civil society*. Lebih dari itu, penguatan *civil society* ini semestinya menghormati

isu gender karena dengan demikian tidak memilah kemampuan hanya berdasarkan gender.

Pertanyaannya, apakah pemilu 2009 akan berhasil memilih figur yang mampu menjaga kesinambungan reformasi atau tidak. Hal ini sebagian besar akan tergantung pada figur dan latar belakang figur yang terpilih: apakah ia sungguh-sungguh pro-demokrasi yang artinya juga bisa memberdayakan *civil society*. Atau malah sebaliknya hanya bersembunyi di balik isu demokrasi untuk memuluskan keinginannya memimpin negara ini. Bagaimana pun juga pemilu 2009 harus menjadi momentum penting bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan terbentuknya *civil society*. Dan bukan sebaliknya kemunduran demokrasi dan lemahnya *civil society*.

Dari uraian singkat tentang dinamika *civil society* di bawah rezim Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi dan *civil society* tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem pemerintahan dan siapa yang memerintah. Keterkaitan ini sangat erat karena sistem pemerintahan dan siapa yang memerintah akan mewar-

nai maju atau mundurnya *civil society*. Apakah kebebasan yang bakal diperoleh atau malahan sebaliknya kendala yang akan dialami juga tergantung pada sistem yang hendak diterapkan oleh presiden yang terpilih. □

Daftar Bacaan

- Fukuyama, Francis, *The End of History?* *National Interest* (1989): 3-18
- Hegel, G.W.F. 1942, *The Philosophy of Right*, trans. T.M. Knox, Oxford, Clarendon Press.
- Hobbes, Thomas, 1968, *Leviathan*, ed. C.B. Macpherson, Harmondsworth: Penguin.
- Locke, John, 1962, *Two Treatises of Government*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Marx, Karl and Engels F., 1968, *Selected Works*, London: Lawrence and Wishart.
- Montesquieu, C. de, 1969, *The Spirit of Laws*, Glencoe, III: Free Press.
- Pearce, Jenny, 2000, 'Development, NGOs, and Civil Society: The Debate and its Future', dalam Deborah Fade (ed.), *Development, NGOs, and Civil Society*. Oxford: Oxfam.
- Suseno, Franz Magnis, 1993, "Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Disunting oleh Tim Redaksi Driyarkara, Jakarta: Gramedia Utama
- Uhlen, Anders, 1997, *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": The Indonesian Pro-Democracy Movement in Changing World*. Richmond: Curson Press.